

REKONSILIASI ETNIS: MISI BERSAMA KOMUNITAS KRISTEN TIONGHOA

MARKUS DOMINGGUS

PENDAHULUAN

Dalam diskusi yang diadakan bersama oleh Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Arief Budiman menyampaikan bahwa ada empat konflik besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia hari ini. Salah satu dari keempat konflik itu adalah konflik antara Cina dan pribumi.¹ Masing-masing konflik, menurut Budiman, memiliki dimensi vertikal, yaitu antara negara dan masyarakat, dan dimensi horisontal, yaitu antara masyarakat dan masyarakat.²

Komunitas Kristen Tionghoa³ sebagai suatu entitas sosial hidup dan melayani di tengah konflik-konflik tadi, khususnya di tengah arus pusaran konflik etnis Tionghoa dan etnis Indonesia lainnya. Ditilik dari sejarah hidup dan pelayanannya, maka berada dalam suasana konflik semacam ini merupakan suatu pengalaman yang sangat menyakitkan dan penuh pengorbanan. Bukan itu saja, konflik yang terus-menerus dengan saudara-saudara sebangsa dari etnis lain telah melahirkan pula rasa dendam, kebencian dan kecurigaan yang terus membara dalam kenangan kolektif masyarakat, baik pada etnis Tionghoa maupun etnis Indonesia lainnya. Suasana ini jelas tidak menguntungkan bagi pelayanan dan kesaksian komunitas Kristen Tionghoa di Indonesia. Dibutuhkan suatu terobosan awal untuk meretas jalan bagi terciptanya situasi dan kondisi pelayanan yang memungkinkan setiap etnis di Indonesia mendengar berita Injil Yesus Kristus dari tangan komunitas Kristen Tionghoa.

Melalui tulisan ini saya hendak mengajukan suatu tesis yaitu komunitas Kristen Tionghoa Indonesia hadir di tengah-tengah bumi Nusantara ini bukan hanya demi dirinya sendiri. Sesuai dengan Injil

¹"Arief Budiman Menawarkan Pola Umum Rekonsiliasi Nasional," *Kompas* (10 November 2000) 7.

²Ibid.

³Apa yang saya maksud dengan istilah ini amat dipengaruhi oleh lingkungan gerak pelayanan saya selama ini. Sekalipun yang ada dalam pikiran saya adalah semua orang Tionghoa Kristen, namun dalam refleksi ini pemahaman saya lebih banyak berputar di dalam lingkup gereja-gereja Injili yang berbasis etnis Tionghoa.

Yesus Kristus yang diberitakannya, komunitas Kristen Tionghoa pertama-tama hadir untuk menjadi saksi Kristus bagi bangsa ini. Untuk mencapai hal ini maka diperlukan suatu terobosan radikal dari pihak komunitas Kristen Tionghoa untuk membuka jalan bagi tersampainya dan *diterimanya* Injil Yesus Kristus, kepada dan oleh seluruh bangsa ini. Asumsi yang mendasari hal ini ialah bahwa Injil Yesus Kristus adalah suatu *kabar baik* yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Sebagai suatu *kabar baik* maka tidak mungkin bagi komunitas Kristen Tionghoa membuat Injil itu diterima seperti demikian, bila terlebih dahulu tidak membuat dirinya diterima dengan *baik* oleh komunitas-komunitas etnis Indonesia lainnya. Usaha untuk membuat dirinya diterima dengan baik, menurut saya, hendaknya datang dari pihak komunitas Kristen Tionghoa. Usaha ini hendaknya mengakar sampai ke dalam kesadaran kolektif komunitas Kristen Tionghoa dan terwujud dalam bentuk rekonsiliasi.

Rekonsiliasi mengandaikan bahwa pernah atau sedang terjadi konflik di antara etnis Tionghoa Indonesia dan berbagai etnis yang ada di bumi Nusantara ini. Komunitas Kristen Tionghoa sebagai bagian dari entitas etnis Tionghoa mau tidak mau terlibat pula dalam arus konflik ini. Realitas hidup kita hari ini membuktikan bahwa konflik ini memang benar-benar ada, baik yang terungkap secara lahiriah lewat berbagai sikap, stigma sampai tindakan-tindakan diskriminatif dan represif, maupun yang tersimpan dalam batin dan terungkap dalam pikiran-pikiran yang *biased*. Situasi semacam ini jelas kontraproduktif bagi pelayanan dan kesaksian komunitas Kristen Tionghoa di Indonesia.

Untuk itu saya akan menempuh prosedur demikian: pertama-tama saya akan mengajak Anda membaca sejarah untuk mencari tahu di mana akar konflik Tionghoa dengan etnis Indonesia lainnya berada. Dari situ saya akan membawa Anda sejenak merenungkan apa yang dikatakan Alkitab mengenai misi rekonsiliasi, dan akhirnya saya mencoba memberikan beberapa kemungkinan yang dapat saja terjadi bila misi rekonsiliasi ini kita tuntaskan atau tidak kita tuntaskan hari ini.

TINJAUAN SEJARAH

Sejarah kehadiran dan konflik antara etnis Tionghoa dan etnis Indonesia lainnya, menurut para ahli, umumnya dibagi dalam *periode prakolonialisme Belanda*, *periode pemerintahan kolonial Belanda*, *periode pendudukan Jepang*, *periode Orde Lama*, dan *periode Orde Baru*. Di sini kita akan melihatnya secara garis besar menyeluruh saja.

Dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) baru-baru ini, diungkapkan kembali bahwa orang Tionghoa sudah hadir di bumi Nusantara lama sebelum VOC

datang. Selama itu mereka diterima dengan oleh penduduk setempat di mana mereka datang. Bahkan Leonard Busse, sinolog dari Universitas Leiden, dengan tegas mengatakan bahwa terjadi proses adaptasi damai di antara penduduk setempat dan pendatang dari daratan Tiongkok ini.⁴ Kedatangan mereka tidak mengalami penolakan, dikucilkan, apalagi dijadikan kambing hitam seperti yang kerap dialami saat ini.⁵

Situasi mulai berubah setelah kedatangan pemerintah kolonial Belanda. Dalam upaya mempertahankan kekuasaan imperialisnya di Indonesia dan menghalangi munculnya “kelas menengah” dalam masyarakat pribumi, pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik minoritas.⁶ Kelas menengah masyarakat pribumi yang ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda adalah kelompok pedagang pribumi. Bagi Belanda, kelompok ini berpotensi menjadi gerakan perlawanan terhadap mereka. Untuk melemahkannya pemerintah memberikan dukungan khusus tertentu kepada komunitas Tionghoa, dan tanpa mereka sadari, mereka dibentuk menjadi alat pemerintah Belanda. Dukungan ini semakin melemahkan potensi perdagangan penduduk pribumi dan makin mengukuhkan komunitas Tionghoa sebagai kaum pedagang yang handal.

Bersamaan dengan itu, pemerintah kolonial Belanda makin mengukuhkan perbedaan status politik warga Hindia Belanda dengan membagi masyarakat ke dalam tiga golongan besar, yaitu *golongan elit atas*, terdiri dari penguasa Belanda atau keturunan Eropa lainnya; *kelas inlander*, yaitu kelas terbawah dalam strata sosial yang terdiri dari *warga pribumi*; dan di antara kedua golongan ini ada yang disebut *golongan Timur Asing*, orang Tionghoa termasuk di dalamnya.⁷

Konstruksi sosial semacam ini membuat kalangan pribumi menjadi tidak senang. Demikian juga dengan pemberian keistimewaan dalam perdagangan membuat warga pribumi menjadi benci kepada orang Tionghoa, sehingga timbul dan berkembang kebencian terhadap komunitas Tionghoa.⁸

⁴“Seminar ‘Orang Indonesia-Tionghoa: Manusia dan Kebudayaan’ Membongkar Mitos-mitos,” *Kompas* (15 November 2000) 8. Budi Susanto, mengutip Anthony Reid, mengatakan, “Orang-orang Tionghoa pendatang diakui sebagai kaum pencinta damai, ramah, dan tidak punya ambisi kekuasaan. Para penguasa lokal yakin bahwa kedatangan mereka semata-mata untuk berdagang tanpa perlu kecurigaan pada hal-hal lainnya.” Lihat artikel “Rekayasa Ekonomi (Indonesia 1800-1950): Siasat Penguasa Tionghoa” dalam *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa* (Yogyakarta: Kanisius, 1996) 12.

⁵Ibid.

⁶Ini adalah terminologi Daniel S. Lev yang ia sampaikan dalam seminar tersebut.

⁷Susanto, *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa* 12.

⁸Kebencian-kebencian itu bisa bermacam-macam, mulai dari yang sederhana seperti ejekan, sampai kepada yang dahsyat seperti pembunuhan; lih. Susanto, *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*.

Menjelang masuknya tentara Jepang ke Indonesia, terjadi kevakuman kekuasaan di banyak tempat dan terjadi kerusuhan di berbagai tempat sehingga banyak orang Tionghoa menjadi korban, baik harta maupun nyawa.⁹ Situasi ini melahirkan pandangan di dalam diri orang Tionghoa bahwa bukan Jepang yang harus ditakuti melainkan bangsa Indonesia.¹⁰ Kondisi ini dicurigai oleh Didi Kwartanada sebagai penyebab mengapa orang Tionghoa akhirnya mau berkerja sama dengan Jepang, pihak yang sebelumnya amat dimusuhinya.¹¹ Suatu tindakan yang dibaca negatif oleh warga pribumi, dan makin memperdalam kebencian kepada mereka.

Pada hal, berkaitan dengan kebijakannya terhadap orang Tionghoa, Jepang sebenarnya berusaha mengeksploitasi mereka semaksimal mungkin untuk membantu perangnya, baik dari segi dana maupun tenaga. Untuk mencapai hal itu pemerintah Jepang melancarkan budaya *resinifikasi* (=pen-Tionghoa-an kembali) guna mengambil hati orang Tionghoa. Pada satu sisi, keinginan Jepang tercapai, namun di sisi lain, golongan Tionghoa kembali menghadapi benturan dengan warga pribumi, khususnya dalam masalah penyediaan wanita penghibur bagi tentara Jepang.¹²

Setelah ditinggalkan oleh Belanda maka pemain utama dalam gelanggang perdagangan Indonesia adalah golongan Tionghoa. Kebijakan nasionalisme ekonomi Orde Lama secara otomatis menjadikan orang Tionghoa sebagai satu-satunya pemilik modal kuat yang tersisa. Kendati demikian, posisi ini juga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi orang Tionghoa karena marginalisasi politik ekonomi warga pribumi selama masa penjajahan Belanda mengakibatkan mudah timbul isu-isu rasialisme yang destruktif bagi orang Tionghoa.¹³

Salah satu program nasionalisme ekonomi Indonesia yang terkenal adalah Program Benteng. Program ini didisain untuk “mendorong pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan importir asing (Tionghoa).”¹⁴ Namun kebijakan ini akhirnya dimanfaatkan oleh sejumlah elit politik untuk memperkaya diri sendiri atau menghimpun dana politik. Ini dimungkinkan karena pengusaha pribumi belum memiliki kemampuan fasilitas yang disediakan oleh Program Benteng ini. Karena itu, yang memanfaatkan fasilitas tersebut akhirnya adalah para

⁹Didi Kwartanada, “Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945” dalam *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa* 28.

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

¹²Salah satu pemicu pemberontakan PETA di Blitar menurut Didi Kwartanada, ialah ketidaksenangan tentara PETA terhadap orang Tionghoa yang atas perintah Jepang merekrut perempuan Indonesia sebagai *jugun ianfu*. Ibid. 34.

¹³A. Made Tony Supriatna, “Bisnis dan Politik: Kapitalisme dan Golongan Tionghoa Indonesia” dalam *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa* 76.

¹⁴Ibid.

pengusaha Tionghoa yang memang sudah berpengalaman bisnis sejak masa pemerintahan kolonial Belanda.¹⁵ Hal ini kembali menjadi alasan kebencian masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa.

Pada masa Orde Baru pemerintah mengambil kebijakan untuk “memilih modal dari golongan etnis Tionghoa (walaupun tidak secara terang-terangan) sebagai komponen pembentukan modal dalam negeri.”¹⁶ Hal ini dipersepsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia lainnya, lagi-lagi sebagai *pengistimewaan*, dan memandang orang Tionghoa secara negatif serta menimbulkan kecemburuan di hati.¹⁷ Padahal, ini bukan pilihan warga Tionghoa sendiri,¹⁸ namun ini tidak bisa dipahami oleh etnis Indonesia lainnya.

Kebencian dan rasa tidak senang, kalau tidak mau dikatakan permusuhan, yang sudah tertanam selama beberapa generasi pada akhirnya menghasilkan letupan-letupan emosional massa yang tidak terkendali. Peristiwa yang sangat menyakitkan bagi orang Tionghoa Indonesia pada dekade terakhir ini adalah kerusuhan Mei 1998, di mana diberitakan banyak wanita Tionghoa yang diperkosa oleh para perusuh.¹⁹

REFLEKSI

Bila kita mau membaca sejarah dengan hati jujur maka tidak bisa dipungkiri ada kebencian dan rasa permusuhan yang amat mendalam di dalam ingatan kolektif etnis-etnis Indonesia terhadap etnis Tionghoa; demikian juga sebaliknya. Kebencian dan rasa permusuhan ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui berbagai sikap, pikiran, stigma dan perlakuan diskriminatif.²⁰ Hal ini meluas dalam seluruh aspek dan strata sosial masyarakat bahkan terasa juga di lembaga-lembaga keagamaan.

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid. 81.

¹⁷Dr. Thung Ju Lan, seorang staf peneliti di LIPI, memetakan masalah ini secara ringkas dan baik dalam tulisannya, “Susahnya Jadi Orang Cina: Ke-Cina-an Sebagai Konstruksi Sosial” dalam *Harga Yang Harus Dibayar: Sketsa Pergumulan Etnis Cina di Indonesia* (Ed. I. Wibowo; Jakarta: Gramedia, 2000) 174-178. Orde Baru, menurutnya, “telah menciptakan kondisi di mana isu ‘ke-Cina-an’ terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pendapatan ekonomi, baik di antara kelompok etnis Cina dengan pribumi, maupun di antara pribumi sendiri” (h. 178).

¹⁸Tony Supriatna memberikan tiga alasan mendasar mengapa pemerintah Orde Baru melakukan hal itu, lihat tulisannya pada buku yang sama hal. 81-82.

¹⁹Mengomentari apa yang terjadi pada Mei 1998 ini, menurut I. Wibowo tidak mungkin hal itu tanpa terlebih dahulu tersimpan *sentimen* terhadap kelompok etnis Tionghoa (lih. “Kapan Kecinaan Akan Berhenti?” dalam *Harga Yang Harus Dibayar: Sketsa Pergumulan Etnis Cina di Indonesia* 255).

²⁰Istilah “Cino” yang kerap dipakai untuk memanggil orang Tionghoa di Jawa berkonotasi mengejek; juga sebutan “*hoan-na*,” yang berarti “orang yang tidak bisa dipercaya,” yang dipakai oleh orang Tionghoa untuk pribumi; untuk yang terakhir lihat Kwartanada dalam *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa* 38.

Gereja sebagai salah satu bagian dari lembaga keagamaan masyarakat pun tidak steril dari infeksi ini. Dalam tataran kebijaksanaan atau peraturan gereja mungkin memang tidak ada, tetapi dalam tataran praktek dan hubungan antara sesama warga gereja, hal ini bisa dirasakan. Kecurigaan, rasa tidak percaya, dan perlakuan yang tidak setara, disadari atau tidak, kerap muncul.

Di tengah konteks kehidupan sosial seperti ini jelas komunitas Tionghoa Kristen tidak bisa melayani dan bersaksi dengan produktif. Bagaimana bisa, kalau kehadiran kita belum apa-apa sudah dicurigai dan dimusuhi? Bagaimana kita bisa memberitakan Injil damai sejahtera Yesus Kristus sementara di dalam ingatan kolektif masing-masing tersimpan bara kecurigaan, dendam, kemarahan dan kebencian yang terus membara? Di titik inilah pembicaraan kita mengenai misi rekonsiliasi menjadi suatu keniscayaan.

MISI REKONSILIASI

Rekonsiliasi dalam pemahaman Alkitab mengandaikan adanya suatu relasi yang rusak atau terputus karena adanya suatu masalah di antara dua pihak yang sebelumnya berhubungan baik. Kedua pihak utama yang sebelumnya berhubungan baik adalah Allah dan manusia. Terputusnya hubungan ini adalah karena dosa yang dilakukan manusia; ini menimbulkan konsekuensi yang luas dalam kehidupan manusia.

Rusaknya hubungan antara Allah dan manusia mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dan dengan ciptaan Allah yang nonmanusia.²¹

Dalam kaitan pembicaraan kita maka dosa mengakibatkan keterasingan (alienasi) antara manusia dan sesamanya. Keterasingan ini menimbulkan rasa curiga, benci dan perseteruan. Suatu perseteruan yang bahkan menjangkau masuk sampai kepada hubungan-hubungan manusia yang paling intim, yaitu di dalam keluarga seperti yang dilambangkan melalui cerita Kain dan Habel (Kej. 4:1-16).

Persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia karena manusia tidak mempunyai kapabilitas untuk melakukannya. Dosa yang menguasai segala dimensi hidupnya adalah penyebabnya. Selain itu, persoalan ini tidak melulu berdimensi horisontal, hubungan antarmanusia belaka. Persoalan keterasingan dan perseteruan ini, menurut Alkitab, mengakar dalam pada rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Lantas siapa yang dapat menyelesaikannya?

²¹Bruce Milne, *Mengenal Kebenaran* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993) 149-153. Milne menambahkan satu akibat lain yang dialami manusia selain dari akibat-akibat tersebut, yaitu rusaknya hubungan manusia dengan waktu.

Alkitab menyaksikan dengan jelas sekali bahwa Allahlah yang berinisiatif menyelesaikan persoalan ini.²² Dalam 2 Korintus 5:18-19, Paulus menulis demikian, “Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya . . . Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus . . .”

Kendati demikian, rekonsiliasi ini tidak berhenti sampai di situ saja. Di dalam teks yang sama Paulus juga dua kali mengatakan bahwa Allah “telah mempercayakan *pelayanan* pendamaian itu kepada kami” dan “telah mempercayakan *berita* pendamaian itu kepada kami.” Selanjutnya, di ayat 20 ia menyebut dirinya dan rekan-rekannya sebagai *utusan-utusan Kristus* untuk meminta jemaat Korintus *didamaikan* dengan Allah. Jadi di sini jelas bahwa pendamaian tidak berhenti hanya sampai dialami oleh orang Kristen, namun harus menjadi suatu *berita* dan *pelayanan* yang disampaikan dan dilakukan; di sini orang Kristen adalah utusan-utusan berita dan pelayanan pendamaian itu.

Sebagai berita maka pendamaian harus disampaikan, tetapi sebagai suatu pelayanan pendamaian harus dikonkretkan. Kelemahan kita selama ini adalah bahwa pendamaian lebih banyak diproklamasikan saja sedangkan tindakan konkret masih belum nampak. Kita masih belum memberikan porsi yang seimbang di antara keduanya.²³

Dalam tulisannya, A. van Egmond memberikan dua pengertian yang baik. *Pertama*, gereja adalah *komunitas* umat yang bukan hanya mengenal bahwa mereka sendiri telah diterima Allah, tetapi juga bahwa sesamanya dalam *komunitas* itu juga telah diterima oleh Allah. Ini yang saya namakan sebagai *rekonsiliasi intra-komunitas*. Usaha ini diwujudkan dengan saling menerima satu sama lain (*mutual acceptance*) di dalam gereja.

Kedua, gereja adalah komunitas umat yang mengenali orang-orang yang berada di luar dinding-dindingnya sebagai orang yang diperdamaikan, dibenarkan dan diterima Allah. Jadi, gereja berada di dalam dunia dengan suatu pelayanan pendamaian. Untuk mencapai tujuan ini, gereja, menurut van Egmond, “*can teach others, outside of their circle, also to live as reconciled people and to be reconciled with one another.*”²⁴

Dengan misi rekonsiliasi yang diletakkan Allah di pundak kita, maka sudah seharusnya komunitas Kristen Tionghoa di Indonesia ikut aktif

²²A. van Egmond, “The Ministry of Reconciliation” dalam *REC Theological Forum* XXV/3 (October 1997) 13.

²³Mike Smuts mengkritik kecenderungan ini yang disebutnya sebagai *the evangelical stand* —posisi kaum Injili (lih. M. Smuts, “Atonement as Ministry of the Local Church” dalam *REC Theological Forum* XXV/3 (October 1997) 21.

²⁴*Ibid.* 16; yang dicetak tegak adalah penekanan penulis.

menuntaskan pekerjaan besar ini. Kita harus terjun langsung dengan strategi yang jelas, bukan sekadar memberitakan Injil perdamaian, tetapi lebih dari itu, bertindak konkret untuk mewujudkan perdamaian secara utuh, yaitu dengan melakukan upaya rekonsiliasi dengan seluruh etnis lain yang ada di Indonesia.

KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN MASA DEPAN

Membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan apabila yang saya tawarkan dalam tulisan ini kita laksanakan, tidak boleh dipisahkan dari realitas komunitas etnis Tionghoa di Indonesia hari ini. Apa yang saya maksudkan di sini adalah begitu kayanya potensi yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi berkat besar bagi negara ini. Empat hal yang bisa saya sebutkan di sini adalah:

Potensi Sosial-Ekonomi

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di negara ini potensi sosial-ekonomi komunitas Tionghoa merupakan sesuatu yang telah sangat berperan dalam membangun perekonomian bangsa ini. Aktivitas ekonomi komunitas Tionghoa seolah menjadi *roh* yang menghidupkan kegiatan perekonomian bangsa ini.²⁵ Karena itu, beralihnya modal etnis Tionghoa ke luar negeri dianggap seperti *kiamat* bagi Indonesia.²⁶ Bisa dikatakan bahwa kekuatan ekonomi bangsa berada di tangan etnis Tionghoa.

Potensi Sumber Daya Manusia

Tingkat sosial-ekonomi yang cukup mapan membuat sebagian besar warga etnis Tionghoa memiliki tingkat kesejahteraan di atas rata-rata warga Indonesia lainnya. Ini berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan warga Tionghoa. Banyak di antara mereka yang mengenyam pendidikan yang sangat bermutu, malah sampai ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Kondisi ini jelas berpotensi besar untuk memberikan kontribusi yang sangat positif bagi negara ini.

²⁵Contoh sederhana bisa dilihat di Jakarta pada perayaan Tahun Baru Imlek, 24 Januari 2001 lalu. Harian Kompas mencatat "Aktivitas ekonomi yang sehari-hari disemarakan oleh warga Tionghoa praktis sepi karena seluruh pengusaha keturunan etnis itu menutup tempat usahanya." *Kompas* (25 Januari 2001) 1.

²⁶Contoh kasusnya bisa dilihat setelah peristiwa kerusuhan Mei 1998, di mana banyak warga etnis Tionghoa melarikan diri ke luar negeri dengan membawa banyak kapitalnya juga. Situasi ini sempat membuat banyak orang, termasuk pemerintah, menjadi sangat cemas.

Perubahan Kebijakan Pemerintah

Seiring dengan arus demokrasi dan hak-hak asasi manusia yang melanda dunia saat ini, kebijakan pemerintah yang selama ini bersifat diskriminatif, kalau tidak mau dikatakan represif, terhadap warga etnis Tionghoa juga mengalami perubahan. Kini, warga Tionghoa diberikan ruang sosial, budaya, hukum dan politik yang terbuka luas.²⁷ Warga Tionghoa diberikan kebebasan untuk berekspresi, sesuatu yang mustahil diperoleh pada masa Orde Baru.

Kepemilikan Institusi-institusi Pendidikan

Potensi lain yang dipunyai oleh warga Indonesia etnis Tionghoa adalah kepemilikan atas beberapa institusi pendidikan yang *sangat* berbobot di negeri ini. Sekalipun itu bukan dimiliki secara mutlak, namun banyak warga Tionghoa yang memiliki *saham* dalam lembaga-lembaga itu. Khusus dalam lembaga pendidikan teologi, beberapa sekolah tinggi teologi Injili yang ada di Indonesia didirikan dan dikelola oleh gereja-gereja berbasis etnis Tionghoa.

Dengan keempat potensi tersebut komunitas etnis Tionghoa selama ini telah berbuat banyak bagi negara ini. Namun apa yang dilakukan belum sampai pada taraf yang memuaskan karena masih kentalnya sentimen ras yang terbentuk dari luka-luka sejarah masa lalu. Luka-luka yang disadari atau tidak disadari ini telah diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses stigmatisasi, diskriminasi dan represi, yang timbul akibat ketidaktahuan terhadap sejarah, kultur-budaya dan etos hidup masing-masing. Bila luka-luka ini telah disembuhkan (melalui rekonsiliasi tentunya), saya membayangkan betapa besarnya berkat yang akan dialami oleh sesama warga Indonesia melalui kehadiran *saudara sebangsanya* dari etnis Tionghoa.

Komunitas Kristen Tionghoa dalam hal ini, menurut saya, memiliki tanggung jawab utama untuk menerobos situasi ini. Kita seharusnya berada di depan, sebagai perintis dari usaha-usaha ini. Saya percaya Tuhan Allah menempatkan kita sebagai orang percaya di bumi Indonesia bukanlah suatu kebetulan. Sekalipun dahulu nenek moyang kita datang untuk mencari penghidupan yang lebih baik, namun di balik itu saya yakin sekali bahwa Allah menempatkan kita, lahir-besar-berkarya-mati

²⁷Contoh konkretnya bisa dilihat baru-baru ini dengan menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur fakultatif. Sekalipun ini belum menjawab aspirasi warga Tionghoa, namun penetapan itu merupakan suatu langkah maju terhadap pengakuan eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia.

di bumi Indonesia, pertama-tama, supaya melalui kita terang Injil yang utuh dapat dialami oleh etnis lain di bumi Nusantara ini. Untuk itu, rekonsiliasi etnis seharusnya menjadi *agenda utama* misi kita untuk bangsa ini.

Rekonsiliasi etnis akan membuka jalan baru yang lebih luas dan lebar untuk menjadi berkat besar bagi bangsa ini, melalui Injil Yesus Kristus yang kita beritakan dan melalui kehadiran kita. Bila hal ini tidak kita lakukan maka saya kira apa yang dialami warga Tionghoa selama rezim pemerintahan yang lalu akan terus terulang. Meskipun mungkin kadar dan cakupannya bisa berbeda, tetapi siapa tahu, mungkin bisa lebih buruk daripada yang kita perkirakan. Di sini, komunitas Kristen Tionghoa mempunyai tanggung jawab untuk berdiri sebagai *juru damai* bagi saudara-saudaranya, warga Tionghoa non-Kristen. Bukan hanya itu, komunitas Kristen Tionghoa akan menjadi *utusan-utusan perdamaian* untuk menyembuhkan luka-luka bangsa ini. Saya tidak melihat suatu kesempatan lain di mana Allah sedang menanti gerak kita bagi penyembuhan, pemulihan dan perwujudan Indonesia Baru yang kita idam-idamkan, selain *waktu* dan *saat* ini. Kiranya Yesus Kristus, Sang Raja Damai, menolong kita semua.